

ABSTRAK

Sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia setiap daerah dituntut untuk dapat mandiri, salah satunya dalam hal keuangan, namun dalam prakteknya, masih banyak daerah yang belum mampu mandiri dalam hal keuangan, salah satunya yaitu Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013 sampai dengan 2016 beserta saran kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan rasio kemandirian keuangan Kabupaten Gunungkidul dalam rangka otonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rentang data *time series* yakni dari tahun 2013 sampai dengan 2016, adapun hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu rasio kemandirian keuangan Kabupaten Gunungkidul berdasarkan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (TPD) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 selalu mengalami peningkatan namun selalu masuk dalam kategori instruktif atau sangat kurang dengan nilai rata-rata yakni 10,8%, sedangkan berdasarkan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi serta pinjaman daerah (TPP) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 selalu mengalami peningkatan namun Pendapatan Asli Daerah selalu lebih rendah dibanding dana transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi atau daerah lain dengan nilai rata-rata yakni 12,1% yang menandakan bahwa Kabupaten Gunungkidul belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara sepenuhnya, sedangkan kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan rasio kemandirian keuangan Kabupaten Gunungkidul yakni dengan memaksimalkan seluruh potensi pendapatan yang ada, selain itu juga dengan mengoptimalkan pendapatan yang paling potensial yang mana dalam hal ini yaitu pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Kemandirian Keuangan, Kabupaten Gunungkidul

ABSTRACT

Since the implementation of regional autonomy goes on in Indonesia, each region is required to be independent in finance, but in fact, there are still many regions that are not independent in finance yet, one of them is Gunungkidul Region. This research aims to determine the financial independence ratio of Gunungkidul Regency in the period of 2013 to 2016 and to determine the recommendations can be used to increase the financial independence ratio of Gunungkidul Regency in the implementation of regional autonomy. This research is a descriptive research with time series data for fiscal years of 2013 to 2016. The results show that by using the comparison of Original Local Government Revenue (PAD) and total income (TPD) ratio from period of 2013 to 2016 always increases but always be categorized as instruktif or very low with an average of 10,8%, while by using comparison of Original Local Government Revenue (PAD) and transfer funds from Central/Province Government and region's loan (TPP) from period of 2013 to 2016 always increases but Original Local Government Revenue is always lower than transfer funds from central/province government or other regions with an average of 12,1% that shows that Gunungkidul Region cannot fully perform regional autonomy yet, while recommendations can be used to increase financial independence ratio of Gunungkidul Region is by maximizing whole revenue potency, moreover by optimizing the most potential revenue which in this case is Recreation and Sport Object Retribution.

Keywords: Regional Autonomy, Financial Independency, Gunungkidul Region